



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANDANG HARIS**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**
3. NHK : **189914**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.974.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/174 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.133.500.000
2. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 115.200.000
3. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 61.600.000
4. Tanah Seluas 5250 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 131.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.342.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 84.600.000
7. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 76 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **877.100.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

4. MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK 1.5L RS CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 321.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	365.120.650
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.029.169.485
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.245.640.135
III. HUTANG	Rp.	344.178.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.901.462.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.